

POLITIK IDENTITAS LOKAL DALAM PROSES DEMOKRASI INDONESIA

Yus Hermansyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung

E-mail: yushermansyah@staisabili.ac.id

Received: 04 April 2022; Revised: 30 Mei 2022; Accepted: 15 Juli 2022; Published: Agustus 2022; Available online: Agustus 2022

Abstract

The revival of identity politics at the local level in democracy in Indonesia goes hand in hand with the politics of decentralization. Actors and political elites use this issue to share the power cake under the pretext of justice and prosperity. This study uses a descriptive qualitative method through data collection and various literature which are then analyzed. The results of the study conclude that the factor of identity politics in democracy in Indonesia has not been touched substantially. Democracy is still stuck in procedural and ethnic identity sentiments which still lead to discriminatory practices and exclusivity for certain ethnicities.

Keywords: Identity Politics, Local Politics, and Indonesian Democracy

Pendahuluan

Di akui atau tidak dalam kehidupan politik kebangsaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan politik identitas. Sikap politik seperti ini cukup jitu dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya (CNN, 2022). Fenomena itu sangat kentara ketika jelang tahun politik dimana identitas politik lokal terus merebak liar dengan isu-isu tendensius. Penguatan politik identitas adalah perilaku politis yang mengedepankan golongan atau simbolis tertentu yang tujuannya untuk memperoleh pengaruh politik dalam masyarakat (Nasrudin, 2019).

Politik identitas dapat dimaklumi sebagai dinamika politik dalam berdemokrasi, dimana aspirasi politik yang terakomodir dalam satuan-satuan kelompok masyarakat yang terafiliasi terhadap identitas tertentu (Abdillah, 2012). Persoalannya kini politik identitas yang tengah dibangun tersebut, mengesampingkan politik etika dan moral sebagai ciri orang timur dalam membangun domain politik yang santun dan bermartabat, sehingga tetap menjaga keutuhan bangsa dan bukan sebaliknya. Hal ini jarang disadari oleh para elite politis dalam mengusung gerakan politik

identitas untuk kepentingan dalam mendapatkan forsi kue kekuasaan dari aspek politik dan ekonomi (Lestari, 2018).

Perkembangan format politik Indonesia tampaknya telah mengubah orientasi demokratis dengan format sejahtera, dan berkeadilan. Namun dari pengamatan para ahli bahwa demokrasi yang tengah dibangun jangan terjebak pada aspek normatif, sehingga menghambat tujuan kehidupan sosial politik yang lebih substantif (Törnquist, 2013). Demokrasi di Indonesia jangan sampai dikuasai oleh sekelumit elite oligarki yang haus akan kekuasaan melalui partai-partai politik yang berusaha mengakumulasi kekayaan melalui pintu gerbang pemilu (Robinson, R., & Hadiz, 2012; Winters, 2014). Tumbuh dan berkembang partai politik pasca reformasi terlihat lebih pragmatis dalam membangun konstruksi sistem kepartaian sehingga membentuk mesin kartelisasi politik sebagai pengisap sumberdaya politik dan ekonomi (Ambardi, 2009; Mietzner, 2008; Slater, 2004).

Kondisi ini merupakan hambatan dalam berdemokrasi sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, agar gerbang demokrasi yang jadi pilihan bangsa ini

Mengapa demikian? Ada hal yang sulit dikendalikan ketika kemudian politisasi identitas terlanjut dimainkan dan merusak nilai-nilai kebangsaan sehingga membutuhkan kesadaran semua komponen bangsa ini, serta segera dicarikan solusi agar pengaturan power sharing antara etnis, agama, dan kesukuan perlu dilakukan, dan kita semua harus sadar bahwa kita berpijak dalam kebhinekaan.

Berdasarkan ilustrasi di atas, proses demokrasi politik tentu saja tidak lepas analisis politisasi identitas, maka dalam tulisan ini penulis akan mengulas bagaimana politik identitas dalam proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan koridor demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.

1. Politik Identitas

Lahirnya politik identitas dari kelompok sosial masyarakat yang hingga kini merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi kekuasaan pusat di saat menjalankan roda pemerintahan. Inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam bernegara. Menurut Cressida J. Hayes (2007) politik identitas itu muncul dalam pemahaman yang lebih luas adalah realitas ketidakadilan dari sebagian kelompok masyarakat sosial

tertentu sehingga memaknainya dengan gerakan politik sesaat yang lebih keras dengan mendorong kekuatan etnisitas tertentu. Heller dan Punsher (1995) menerangkan ciri-ciri politik identitas tidak lain adalah suatu gerakan politik yang mengarahkan perhatiannya dengan perbedaan yang merasa unggul dari yang lain dan dikemas dalam kategori politik utama untuk menekan terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan dalam pandangan Donald L Morowitz (2011) politik identitas yakni sikap tegas dalam menentukan siapa yang diikutsertakan dan siapa saja yang menolak, sehingga tampak jelas dalam menentukan keputusan yang tidak berubah.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia dengan munculnya politik identitas ini adalah dinamika politik karena mereka hidup dalam pluralisme bangsa yang tidak lepas dari adanya ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing identitas golongan sosial tertentu. Sebab itu, dengan adanya perbedaan menjadi dasar dan ukuran dalam menyerukan politik identitas di Indonesia agar mereka mempertegas perbedaan tersebut. Jika konflik politik ini tidak segera diantisipasi oleh penyelenggara negara

dikhawatikan akan menimbulkan gesekan sosial di ranah grassroots yang lebih dalam, sehingga menciptakan ruang konflik yang lebih luas dan akan menciptakan ketidakstabilan negara.

Menurut Klaus Von Beyme (dalam Abdillah, 2010), ada tiga hal karakter dalam politik identitas, yaitu membangun narasi besar dan menolak hasil pembangunan dari pemerintahan yang sah dengan mengembangkan suatu teori untuk menyetir faktor-faktor biologis dalam kultur sosial terhadap adanya perbedaan sebagai realitas kehidupan dalam masyarakat. Gerakan politik mereka selalu tendensius guna membangun sistem apartheid terbalik, dan kekurangan pengusung identitas tiada lain selalu membuat golongan ini bersandar kepada teori sensitifitas terhadap kasus-kasus tertentu untuk kepentingan golongannya.

2. Konsep Etnisitas

Konsep etnisitas bisa dilihat dalam dua aspek menurut Christiost (2011), bahwa awal pemikiran primordialisme merupakan bukti diri orang selaku anggota kelompok etnis serta bukti diri golongan dan budayanya sebagai warisan leluhurnya. Pemikiran tersebut fakta dari instrinsik yang statis. Pemikiran instrumentalis merupakan

bukti diri kelompok etnisitas yang bertabiat primordial untuk kepentingan sesaat untuk menghasilkan perbedaan antara etnisnya dengan etnis yang lainnya.

Konsep seperti ini, bahwa etnisitas dapat dimengerti selaku sumberdaya ataupun perlengkapan yang dipunyai sesuatu kelompok atau golongan etnis agar dapat digerakan secara massal dengan jasa yang sangat murah untuk mencapai tujuan. Uraian ini memang sangat ekstrim dari logika akal sehat, yakni seorang bisa mengklaim bukti diri etnis lain untuk mencari keuntungan sangat besar dengan membangun kanal publik politik identitas yang dipolitisasi secara dinamis dengan kesejahteraan dan keadilan. Dalam konsep semacam ini, etnisitas dapat dimengerti pula bahwa sumberdaya ataupun perlengkapan yang dipunyai sesuatu golongan etnik adalah kekuatan sosial dalam pergerakan yang jelas-jelas dimiliki oleh setiap etnisitas bangsa Indonesia.

Kedua konsep tersebut, dapat menjadi nyata sebagai power full dan mudah untuk digerakan, namun tentunya bergantung pada niat dan dari perspektif mana pemikiran tersebut ditunjukkan. Bila itu sebagai bukti diri dari etnisitas,

baik bersumber pada primordialisme ataupun instrumentalis hingga aspek penentuan opsi dalam kemampuan konflik yang akan diperkirakan timbul dari kemauan kelompok etnisitas. Pada sisi lain, untuk menemukan dan pengakuan dari kelompok etnisitas yang lain ataupun anggapan bahwa sesuatu kelompok yang sangat besar akan diperhitungkan identitasnya sehingga dengan mudah untuk mendiskreditkan identitas lainnya sebagai testimoni kekuatan untuk menyerang kekuasaan yang sah.

Menurut Asmore (2011) entitas dalam medium sistematis politik dibuat untuk mengkomunikasikan perbandingan identitas yang dipunyai oleh tiap-tiap kelompok etnis. Komunikasi ini bertabiat relasional serta situasional di mana kepribadian etnis tersebut ikutserta di dalamnya. Kepribadian etnisitas dalam penjelasan ini, bila dibanding dengan konsep nilai, atau value ataupun soft skill dapat menjelaskan kalau ada kesamaan di antara dari kedua etnisitas tersebut. Dengan penafsiran seperti itu, maka dapat dikatakan kalau dalam komunikasi antar etnis, setiap kepribadian etnis sangat memastikan warna berbeda dalam komunikasi yang hendak

diwujudkan dalam mencapai tujuan politik identitas.

3. Politik Identitas Indonesia

Menurut Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken (2012) pembangunan pola pikir politik identitas adalah salah bukti diri dari pembentukan primordialisme masa lalu yakni sejak pemerintahan otoriterialism. Dan negeri ini sangat mungkin untuk menyulap perbuatan politik identitas karena terbangun dengan pluralisme oleh ratusan etnisitas.

Untuk menguatkan pandangan dalam pola pikir, maka dalam uraian politik identitas dimana etnisitas sebagai dasar terbangun negeri ini, maka perbedaan harus menjadi landasan monumental bagi setiap warga bangsa. Dengan pelabelan persamaan, akan sangat bermanfaat dalam urusan politik identitas atau sebagai kontrol politik terhadap warganya sehingga dapat mengenali siapa rekan atau lawan.

Sistem kontrol politik dalam negeri dalam pandangan Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken, terdapat 4 kategori kebijakan yang sempat dijalankan oleh pemerintahan masa lalu, yakni ketika pemerintahan otoriterialism berkuasa.

Pertama; tidak terdapat wilayah yang asli, yakni semua wilayah terbuka untuk semua warga bangsa, contohnya dalam program migrasi ataupun transmigrasi di bagi seluruh komunitas dari sosio kultural hingga politiknya. Kedua, penguasa yang otoriterialism menjauhi terjadinya budaya kasta dan perkara memanfaatkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dipantau dengan ketat. Jargon yang dipilih yang berhak memakai SARA adalah pemerintah yang berkuasa untuk menghukum atau memvonis yang bersalah versi penguasa, akibatnya akan di jauhi kedekatan dengan sosio politiknya. Ketiga, masuk peradaban moden yang bebas, dan pengaruh etnisitas serta terjadinya dekadensi moral. Keempat, negara memantau secara ketat agar tidak terjadi tumpang tindih antara agama dan kesukuan serta adat istiadat. Model tersebut, memang efektif dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa.

Semua aturan pemerintah diatas, memiliki implikasi politis besar di dalam mengolah roda pemerintah atara pusat dengan wilayah pemerintah daerah, dan pemerintah dengan rakyatnya. Sebab itu etnisitas dan agama tidak lagi jadi tempat orang mengespresikan diri secara politik

tetapi tempat dimana orang untuk aman, dan tempat orang untuk menyembunyikan diri secara politik dan budaya.

Terjadinya konflik masa lalu pada ranah lokal daat ditelusuri dalam historis bangsa ini, yakni pada tahun 1995-an sampai Orde Baru rontok dan meyakinkan kita bahwa betapa dahsyatnya kekerasan dengan politik identitas. Konflik politik antar suku, ras, dan agama adalah politik identitas yang sempat mempermalukan para penguasa republik ini di mata dunia. Namun dari beberapa pandangan cendekiawan dengan perubahan arah politik baru, maka optimis kalau agama, ras serta suku bangsa ini bakal lekas sirna kekuatannya karena sudah mengalami pencerahan serta kemajuan. Melihat kondisi politik saat ini pengaruh adanya politik dan kebijakan luar negeri republik ini, dalam realitasnya optimisme para cendekiawan itu meleset karena mereka lupa kalau sentimen-sentimen primordialisme yang semenjak semula sudah ada dan hendak selamanya dengan kebhinekaan.

Liddle, R. William (2016) mengatakan, bahwa kebhinekaan itu telah teruji, meski goncangan politik dan ledakan politik etnisitas begitu besar

dirasakan pengaruhnya. Namun yang mesti diperhatikan bahwa kehadiran negeri selalu ada dalam melindungi warganya. Gambaran itu dapat terlihat dalam pertikaian Dayak vs Madura, peristiwa kekerasan politik Mei 1998 di Jakarta, pengusiran etnis Buton vs Bugis serta Makassar di Ambon. Berbagai kasus SARA tersebut, harus menjadi cermin kebangsaan bahwa negara itu harus lebih awal hadir di dalamnya.

Fakta realitas tersebut, adalah kenyataan empiris dari gerakan politik identitas yang dapat menciptakan konflik baru di beberapa wilayah lainnya, misalnya identitas yang mengusung pergerakan massa dengan tujuan untuk menggoyang kekuasaan secara sengaja dan isu-isu desentralisasi demi keadilan dan kesejahteraan dengan melahirkan konsep putra daerah. Hal inilah yang seharusnya diwaspadai bahwa politik identitas adalah bibit perpecahan sehingga diperlukan pemahaman baru dari politik identitas sebagai bagian dari kebangsaan republik ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersandar kepada metode kualitatif deskriptif yang berkait dengan politik identitas dalam proses demokrasi di Indonesia setelah bergeser dari cengkaman kekuasaan otoriter

Orde Baru dengan melihat dari sudut pandang sosiologis. Menurut Creswell (2014) setiap kajian selalu diawali dengan sebuah proses ilmiah dengan harapan dapat membuka persoalan yang tengah diteliti yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, kajian dapat merekonstruksi gambaran secara menyeluruh yang disajikan dengan laporan dan pandangan yang logis dan jelas. Kajian ini menggunakan data skunder dengan dukungan berbagai literasi yang relevan seperti jurnal, buku, makalah, media massa offline, online, dan lainnya yang dipandang dapat menunjang pengayaan dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Praktik Politik Identitas Masa Lalu

Semasa Orde Baru kekuasaan otoriter begitu kuat dalam melaksanakan roda pemerintahan yang mampu menekan berbagai gejolak yang dipandang dapat merongrong negara. Meski diakui bahwa banyak diantara masyarakat lokal yang kecewa atas ketidakadilan, namun pemerintah Orba mampu mengantisipasi dalam mempercepat munculnya bibit ketegangan politik akibat gerakan identitas kesukuan, ras, dan agama.

kultural sehingga melahirkan bentuk kekecewaan struktural yang panjang. Menurut Syansuddin Haris, ada dua bentuk kekecewaan di Papua, yakni; Pertama, mampu membangkitkan rasa solidaritas sesama suku karena merasa satu perasaan dan dialaminya oleh setiap individu sebagai bagian dari kelompok. Kedua, Kekecewaan yang berkepanjangan dapat diekspresikan dengan menentang atau keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Dalam perspektif politik identitas Papua, gerakan pribumi menuntut referendum adalah implikasi dari adanya eksploitasi politik dan kebijakan pemerintah pusat yang tak berkeadilan. Akhirnya, para elite politik yang bersebrangan berusaha mendorong politik identitas dengan membenturkan dengan kebhinekaan. Padahal, usaha yang mempermasalahkan legitimasi dapat dilakukan dengan usaha membangun kesamaan politik kesukuan dalam rangka mendapatkan hak dan kewajiban dari pembangian sumberdaya baik secara ekonomi maupun politik. Dan bukan lagi mengusung politik identitas yang jelas-jelas telah terkontaminasi politik kepentingan asing.

b. Isu Primordial di Riau

Isu primordial di Riau seringkali diusik oleh para elite politik untuk menekan lawan politik. Sikap yang sangat kentara ketika pilkada, dimana isu primordial menjadi gorengan politik. Dari sisi marketing politik identitas memang efektif untuk tujuan politik, namun yang perlu dipahami adalah jangan kepentingan sesaat/lokal mengorbankan kepentingan nasional.

Salah satu peletak dasar penting adalah pendekatan primordialis-kultural, bahwa dibalik ikatan-ikatan kekeluargaan atau kekerabatan terdapat "a complex of significant relational qualities" yang harus dipahami sebagai primordial dan tidak hanya merupakan suatu fungsi interaksi, tetapi memiliki keberakaran di dalam ikatan-ikatan darah (Edward, 1999). Ikatan-ikatan primordial itu bersifat involunter dan memiliki daya paksa yang mentrasendensi aliansi-aliansi serta relasi-relasi yang dipengaruhi oleh interes-teres situasional dan kondisi-kondisi sosial (Geertz, 1973). Demikian pula dengan mendapat Durkheim tentang perangkat hukum represif, yang merupakan wujud dari kesadaran dan representasi kolektif dalam masyarakat asli dalam konteks pembicaraannya

tentang solidaritas sosial-mekanikal (Durkheim, 1994).

Di satu sisi, politisasi identitas dengan mengoreng primordial secara tak langsung akan membangun kekuatan penolakan. Meski di dalamnya terdapat aspirasi politik masyarakat adalah sebuah fakta sosial yang harus ditangkap secara cerdas oleh para elite politik. Karena itu perlu difahami, bahwa isu primordial, sebaiknya dijadikan kajian bersama dalam konteks memahami persoalan kebangsaan di masa datang. Putra daerah adalah aset bangsa dan telah diatur oleh perundang-undangan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan bangsa ini.

2. Politik Identitas Pasca Reformasi

Politisasi identitas rupa tak lupa untuk berhenti tetapi terus bergulir dengan desentralisasi dan topik politik yang berbeda, meskipun makna serupa. Buchari (2014) mengatakan, era reformasi telah membuka gerbang bagi bangsa ini kearah keterbukaan, demokrasi, Otda, dan desentralisasi yang telah menggugah kesadaran etnisitas bangsa yang pluralisme. Dengan kesadaran etnisitas tersebut, juga telah melahirkan sikap-sikap intoleransi, dan

adanya arogansi keadaerah untuk bebas dari urusan pemerintah pusat dengan mendominasi penguasaan terhadap eksploitasi sumberdaya alam.

Pluralisme etnisitas telah memberikan ilustrasi nyata bagi bangsa ini bahwa anugrah illahi begitu besar dan harus disyukuri. Jangan dengan perbedaan tersebut, harus dibenturkan dengan kepentingan politik identitas yang sebenarnya sudah terlewatkan dengan meleburkan diri menjadi suatu bangsa. Kebangkitan kembali kesadaran politik etnisitas tidak harus disandarkan dengan kepentingan politisasi dalam merebut kekuasaan, tetapi itu semua dijadikan suatu aset bangsa yang terdapat dalam keunikan dan keaslian sumberdaya daerah sebagai pijakan dalam arah politik daerah untuk mencapai kesejahteraan.

Masyarakat yang mulai melek dengan kemajuan pendidikan diuntungkan dengan adanya penguatan kesadaran politik, sehingga secara bersama-sama membangun konstruksi hukum dan politik daerah kearah yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan adanya pondasi baru dalam masyarakat menuju sejahtera. Namun, perlu pula melihat dimana adanya penguatan dalam kesadaran politik etnisitas tersebut,

menunjukkan terjadinya ketimpangan sosial, seperti penggusuran, pengambilalihan paksa, permainan terhadap jabatan-jabatan strategis di tingkat lokal, sehingga mengesampingkan integritas. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi dalam kekuasaan daerah, sehingga terpautnya ketidakadilan rakyat (Maarif, 2012).

a. Isu Politik Identitas di Kalbar

Di era keterbukaan ini telah membawa Kalimantan Barat (Kalbar) kepada kebangkitan politik identitas atau etnisitas yang mendorong para elite Dayak dan Melayu saling lomba berunjuk mengaktualisasikan diri mereka masing-masing. Slogan politik identitas diantara mereka mulai dimainkan dan gesekan sosial pun terjadi, sehingga membuat para elite Melayu khawatir. Hal yang terjadi dalam ranah politik kepemimpinan daerah, dimana etnisitas Dayak mulai mengungguli banyak hal termasuk ekonomi dari Melayu.

Kesuksesan etnisitas Dayak membuat etnisitas Melayu menjadi khawatir. Munculnya putra daerah Dayak dalam kepemimpinan daerah, ada kekhawatiran bahwa mereka akan ditinggalkan atau bahkan dimusuhi oleh orang-orang pribumi yang tengah bergerak menuntut suksesi dalam

kancah kepemimpinan kepala daerah. Persaingan juga dirasakan oleh orang Melayu yang sama-sama merespon setiap suksesi kepemimpinan kepala daerah. Artinya, ada pembagian kue kekuasaan dari para elite politik dari masing-masing etnisitas. Khususnya untuk jabatan bupati dari masing-masing etnis. Sebagai ilustrasi dari fakta yang terjadi dimana kekuasaan itu terbelah, apabila dari etnisitas dayak jadi kepala daerah atau bupati, maka orang wakilnya dipastikan dari Melayu, demikian juga sebaliknya.

Historis Dayak dan Melayu adalah dua kelompok besar di Kalbar. Perbedaan identitas keduanya dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan yakni Islam. Muslim khususnya pribumi Kalbar sebagai Melayu, sedangkan non muslim pribumi adalah Dayak. Dari penelusuran historis bahwa identitas Melayu lebih dulu diterima secara luas, setelah itu identitas Dayak baru kemudian. Kedua kelompok ini hidup bersama dalam zona geografi dan sosial yang sama. Interaksi antar suku di hampir semua aspek kehidupan, mulai administrasi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Identitas keduanya selain diwarnai pasang surutnya hubungan

daerahnya. Adanya sentimen kedaerahan dalam proses politik pada tingkat lokal ini, dipandang lawan politiknya sebagai bentuk aspirasi dangkal karena telah menutup kran politik demokrasi di Kalteng dalam konteks kepemimpinan daerah. Artinya, ada keinginan politik dalam meraih kekuasaan di tataran politik lokal yang kini menjadi dinamika diranah politik isu Kalimantan Tengah. Yang perlu diwaspadai adalah munculnya berbagai petualang politik yang ikut memancing di air keruh dengan turut menggerakkan politik identitas demi tujuan politik tertentu.

c. Isu Putra Daerah di Riau

Secara umum politik identitas juga tampil di Kepulauan Riau, sejak pemerintah Orba perjuangan tersebut tidak pernah surut. Eskalasi politik terus mengalami perubahan terutama persoalan kepemimpinan daerah. Sebagian elemen masyarakat terdorong isu putra daerah tidak hanya ditataran elite politik, namun euforianya sampai ke akar rumput (grassroot). Akhirnya, masyarakat Riau berhasil mendudukan putra daerah sebagai tonggak kepemimpinan daerah jadi Gubernur Riau pasca rontoknya reformasi setelah lenggsernya Orde Baru Soeharto. Tidak

hanya sampai disitu keinginan merambah bupati pun terwujud.

Politik Identitas juga terus berlanjut, yakni mulai menggerus kedalam struktur perangkat birokrasi pemerintah daerah mulai jabatan-jabatan dinas, kabag sampai camat hingga kepala desa digeneralisasi putra daerah. Bahkan terus merangsek kepada korporasi non pemerintah juga diakuisisi oleh para elite lokal. Kini kritikan pun mulai bermunculan, ternyata orang Riau juga rakus kuasa. Kondisi ini mengilustrasikan betapa derasnya politisasi identitas guna mengendalikan semua unsur strategis yang dimulai jabatan penting sampai kepada lever yang bukan domainnya sebagai pernyataan yang keliru terhadap pemaknaan politik desentralisasi.

d. Isu Sumberdaya Ekonomi

Dalam aspek perekonomian nasional dan pasar bebas, dimana pemerintah pusat mendorong masyarakat daerah untuk berperan aktif dalam mengambil peluang pasar global, namun tetap komitmen bernaung dalam ikatan tradisi dan solidaritas pada lingkup yang kecil, seperti kesukuan, agama, kedaerahan dan golongan berdasarkan strata ekonomi, maka disini juga muncul ekspresi diri yang berbau

etnis menjadikan kelompok-kelompok disatukan dalam bingkai demokrasi konsosiasional, agar meminimalisir terjadi konflik. Artinya, dengan demokrasi konsolidasi maka berbagai etnisitas dapat merembes secara teritorial dan genetika. Sementara dari perspektif politik demokrasi konsosiasional dapat terbangun kondisi yang kondusif dan harmonis antar etnisitas.

Membangun konstruksi demokrasi konsosiasional di Indonesia tidaklah mudah. Membutuhkan persyaratan dan peraturan yang dapat ditaati secara bersama-sama oleh semua komunitas dan elemen bangsa ini. Indonesia yang plural mampu menjadi pembilahan SARA-nya ditataran lokal. Menurut pendapat Lijphart (1994) bahwa praktik demokrasi konsosiasional, yakni; adanya itikad dan kemampuan untuk mengakomodir adanya resistensi instabilitas pada tingkat fragmentasi dan polarisasi sosialnya tinggi. Adanya komitmen dalam memelihara keutuhan negara dan bangsa. Artinya, para elite politik dan tokoh masyarakat bertanggung jawab mencegah adanya disintegrasi. Adanya, kemampuan dalam mengangkat persoalan kultural di masing-masing cleavages ke tingkat yang

lebih tinggi, dan adanya kemampuan untk mencari solusi penyelesaian bila terjadi konflik di ranah masing-masing sub kultur sehingga ditemukan formula yang tepat bagi persoalan identitas kultural.

Demokrasi Indonesia tentu saja berbeda dengan dunia barat. Demokrasi prosedural yang berlaku di Barat, sulit diterapkan di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, konstruksi demokrasi di negara-negara membangun adalah demokrasi yang tidak lazim (Uncommon democracy). Sebagaimana logika dari Arent Lipjhart yang berhasil merumuskan konsep alternatif sebagai corak demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Konsep Lipjhart menjelaskan, sebagai suatu kombinasi antara unsur tradisional-primordial dengan nilai demokrasi modern, maka dibangun atas realitas masyarakat yang pluralis dan multi-etnik (primordial) dengan mengaitkan keberadaan institusi demokrasi. Konsep kemudian dikenal dengan Demokrasi Konsosiasional (Consociational Democracy). Secara umum, ciri-ciri demokrasi dapat dilihat dan dipraktikan di beberapa negara seperti di Asia, Malaysia dan Afrika.

Demokrasi konsosiasional di negara yang pluralitas sosial dan

keragaman budaya menjadi ancaman serta tantangan serius agar tetap menjaga integrasi bangsa. Kebebasan di luar kontrol berkemungkinan menimbulkan konflik bagi disintegrasi bangsa. Namun, pada sisi lain tuntutan demokratisasi juga tidak mungkin dielakkan, dan harus mampu memberikan ruang terhadap kekayaan keanekaragaman kehidupan sosial, budaya, dan unit politik lokal. Fenomena ini mengukuhkan pendapat, bahwa wujud demokrasi lebih pada makna substansi dibanding dengan bentuk demokrasi yang dasarnya memang tidak mungkin sama. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang sejarah, sosial, budaya, politik dan perubahan global bentuk atau model demokrasi dalam praktiknya bisa berbeda (Adnan Buyung, 2010).

Simpulan

Adanya penguatan politik identitas dari golongan entitas tertentu merupakan gambaran konstelasi politik kedaerah. Dimana politik hipokrit dari entitas yang tereuforia sehingga terbangun dua dikotomi politik, yakni munculnya kekuatan tokoh daerah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah yang kental isu putra daerah ketika terjadi dalam pergulatan politik pemilihan kepala daerah. Pada sisi lain

wajah politik identitas dapat terimplementasikan dalam sebuah perjuangan daerah sebagai nilai tawar politik guna menggering alokasi anggaran dari pemerintah pusat, dimana dalam proses politik desentralisasi jelas-jelas terbalut oleh isu-isu kekuatan kedaerahan. Makna yang terkandung penuh dengan sarat politik yang dikhawatirkan bukan hanya mengancam demokrasi dengan identitas namun menjadi indikasi politik memudarnya nasionalisme yang lama terbangun.

Politik identitas dalam demokrasi di Indonesia tepatnya dalam dua dekade ini belum memberikan arah kepada substansi demokrasi yang diharapkan. Artinya, pergeseran politik dalam berdemokrasi masih dalam tataran prosedural pada persoalan pemilu dan pergantian para elite politik yang bermain. Tujuan hakikinya, kehidupan masyarakat yang sejahtera secara demokratis masih dalam batas keinginan. Berbagai persoalan bangsa terhadap kasus intoleransi dan kekerasan masih menyelimuti kuat dengan sentimen identitas atas dasar sekelompok etnis dan agama yang berdampak diskriminasi serta munculnya eksklusivitas identitas golongan tertentu dan merendahkan golongan lain yang berbeda.

Kondisioning seperti itu menjadi medium untuk digunakan kepentingan politik sesaat oleh para elite politik untuk mempertajam sentimen identitas dan agama untuk kepentingan politik kekuasaan disaat menjelang pemilu. Hal ini yang membuat demokrasi di Indonesia menjadi resistensi terhadap perpecahan baik secara kultural maupun kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, U. (2010). Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Indonesia Tera.
- Abdillah, U. (2012). Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Indonesia Tera.
- Adnan Buyung, N. (2010). Demokrasi Konstitusional. Kompas Media Nusantara.
- Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Gramedia & LSI.
- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia Pendahuluan Politik Identitas dan Demokrasi: Kerangka Teoritis. Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2(2), 181-188.
- Asmore. Richard, D.; Jussim, L. Dan Wilder, D. (2011). Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction. Oxford University Press.
- Buchari, S. (2014). Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Christ, D. M. G. (2011). Language, Identity and Conflict: A Comparative study of language in ethnic conflict in Europe and Eurasia. Routledge.
- CNN. (2022). Politik Identitas Tak Lagi Dominasi Pemilu di 2024. CNN. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hkGJiJqH2IJ:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220420020550-32-786920/politik-identitas-tak-lagi-dominasi-pemilu-di-2024-apa-alasannya+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Pustaka Pelajar.
- Diamond, D. L. M. (2011). Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk dalam Larry Diamond dan Mars

- Maarif, A. S. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia. Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia, 3–30.
- Maarif, A. S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Yayasan Abad Demokrasi.
- Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia's party systems of the 1950s and the post-Suharto era: From centrifugal to centripetal inter-party competition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(3), 431–453.
- Nasrudin, J. (2019). Politik Identitas dan Representasi Politik. 1, 34–47. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nordholt, HS., & Klinken, G. (2017). Politik Lokal Di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
- Robinson, R., & Hadiz, V. (2012). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets. Routledge.
- Slater, D. (2004). Indonesian Accountability Traps: Party Cartels and Presidential Power After Democracy Transition. *Indonesia*, No. 78 (Oktober).
- Syamsuddin Haris. (1999). Indonesia di Ambang Perpecahan. Erlangga.
- Törnquist, O. (2013). Assessing dynamics of democratisation: Transformative politics, new institutions, and the case of Indonesia. Springer.
- Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. In M. Ford, & T. Pepinsky, *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell University Press.
- Yusriadi, Hermansyah, dan D. A. (2017). Etnisitas di Kalimantan Barat. STAIN Pontianak Press.